



Pegunungan Cycloop Papua.
Foto: Theodora F Resubun

DALAM EDISI BULAN INI

- 01 FORCLIME 4.0 dukung pengarusutamaan SDGs di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 02 FORCLIME siap dukung Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat susun rancang bangun baru untuk wilayah KPH
- 03 FORCLIME siap dukung Pokja Perhutanan Sosial Papua Barat
- 04 FORCLIME dukung upaya selaraskan kesehatan manusia dan kesehatan hutan di Tanah Papua
- 05 Evaluasi Program Bakti Rimbawan bersama Kepala KPH
- 06 FORCLIME dukung Balai TN Wasur laksanakan evaluasi rencana pengelolaan jangka panjang

Editorial

Dalam edisi bulan September ini, newsletter FORCLIME menampilkan artikel utama terkait dengan komitmen FORCLIME 4.0 untuk melanjutkan dukungannya terhadap pengarusutamaan SDGs di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sejak dibentuknya Pokja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) KLHK pada tahun 2018, FORCLIME telah berperan aktif dalam diskusi dan fasilitasi pertemuan-pertemuan di lingkup KLHK, mendiseminasikan dokumen terkait serta menyediakan tenaga ahli yang diperlukan. Dukungan kepada Pokja SDGs KLHK dalam implementasi pengarusutamaan SDGs akan dilanjutkan selama pelaksanaan FORCLIME 4.0 dengan fokus penekanan kesinambungan pengarusutamaan SDGs melalui kebijakan serta monitoring dan evaluasi terhadap implementasinya di Unit Eselon I.

Informasi lain terkait dengan pelaksanaan program adalah kesiapan FORCLIME untuk mendukung mitra kerja di Papua Barat, antara lain: Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dalam menyusun rancang bangun baru untuk wilayah KPH di Papua Barat; Pokja Perhutanan Sosial dalam pelaksanaan kegiatannya, termasuk penyusunan *roadmap* Perhutanan Sosial.

Saat ini FORCLIME beserta mitra kerja di Tanah Papua sedang menyiapkan studi kelayakan terkait dengan upaya menyelaraskan kesehatan manusia dan kesehatan hutan di Tanah Papua. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Kabupaten Jayapura (Provinsi Papua) dan Kabupaten Tambrau (Provinsi Papua Barat) dan

akan melibatkan para pihak terkait, termasuk Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (Papua Barat dan Papua), Universitas Papua dan Universitas Cenderawasih, serta dinas kesehatan di kedua kabupaten tersebut.

Terkait dengan sinergi yang dilakukan dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK), FORCLIME mendukung kegiatan pelaksanaan evaluasi program Bakti Rimbawan, antara lain berupa dukungan dalam pelaksanaan FGD bersama Kepala KPH di seluruh Indonesia.

Berita penting lainnya dalam edisi September ini adalah komitmen FORCLIME dalam mendukung Balai Taman Nasional (TN) Wasur mengadakan evaluasi terhadap Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Balai TN Wasur 2014-2023.

Seperti diketahui bersama, dengan berkomunikasi dan berkoordinasi dapat menghasilkan sinergi sehingga para pihak yang bekerja sama memperoleh manfaat.



Wandojo Siswanto

Manajer bidang strategis kebijakan hutan dan perubahan iklim

FORCLIME 4.0 dukung pengarusutamaan SDGs di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan kesepakatan yang memuat tujuan dan sasaran global yang dimulai dari tahun 2016 hingga 2030. Kesepakatan para pemimpin dunia tersebut memuat 17 *goals* yang bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Indonesia sebagai salah satu penandatangan kesepakatan, menindak lanjutinya dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pengarusutamaan (*mainstreaming*) TPB/SDGs dilakukan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 sehingga terintegrasi menjadi tujuan pembangunan nasional.

Upaya pengarusutamaan TPB/SDGs di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diawali dengan penerbitan SK Menteri LHK Nomor SK.346/MenLHK/Setjen/Set.1/8/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana, Pokja dan Tim Pakar TPB/SDGs tahun 2017 – 2019. Tim ini dibentuk untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan pencapaian TPB/

SDGs secara terpadu dan terkoordinasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sebagai salah satu program kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Federal Jerman di bidang kehutanan, FORCLIME memberi dukungan dalam upaya pencapaian TPB/SDGs di KLHK. Dukungan dimaksud dilakukan melalui Biro Perencanaan KLHK yang merupakan *Project Executing Agency* (PEA) untuk FORCLIME, yaitu dengan memfasilitasi pertemuan-pertemuan dalam rangka penyusunan keputusan serta penyusunan program.

Sejak dibentuknya Pokja TPB/SDGs KLHK pada tahun 2018, FORCLIME berperan aktif dalam diskusi dan fasilitasi pertemuan-pertemuan di lingkup KLHK serta mendiseminasikan dokumen terkait, selain itu, juga menyediakan tenaga ahli. Salah satu pertemuan atau agenda rutin Pokja TPB/SDGs adalah serial diskusi TPB/SDGs yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Litbang dan Inovasi KLHK sebagai Ketua Tim Pelaksana TPB/SDGs. Diskusi ini bertujuan untuk memonitor pencapaian Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs sekaligus sebagai upaya membangun kesepahaman terhadap komitmen implementasi TPB/SDGs di KLHK.

Pokja TPB/SDGs KLHK telah menyusun *roadmap* (peta jalan) TPB/SDGs KLHK pada bulan Oktober 2018 dan beberapa pertemuannya difasilitasi oleh FORCLIME.

Dokumen peta jalan TPB/SDGs di KLHK memuat target dan indikator kinerja yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs sesuai Permen PPN/ Bappenas Nomor 7 Tahun 2018; serta gambaran kontribusi KLHK dalam pencapaian setiap tujuan dalam TPB/SDGs. Dalam SK Kepala Bappenas No. Kep. 64/M. PPN/HK/04/2018 tentang tim pelaksana, kelompok kerja, dan tim pakar tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2017-2019, sektor lingkungan hidup dan kehutanan berperan dalam **tujuh goal**, yaitu:



Goal 3: Good Health and Well-being (restorasi ekosistem sebagai langkah preventif penyebaran penyakit tropis yang terabaikan);



Goal 6: Clean Water and Sanitation (rehabilitasi lahan kritis di dalam area DAS baik secara sipil teknis maupun secara vegetative; Peningkatan tutupan lahan berhutan di daerah tangkapan air dan pemeliharaan mata air; Penegakan hukum terhadap kasus pencemaran air);



Goal 9: Industry, Innovation and Infrastructure (pelayanan izin lingkungan serta penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan infrastruktur nasional; Penelitian pengembangan dan inovasi LHK di berbagai daerah);



Goal 11: Sustainable Cities and Communities (penyediaan bibit untuk penghijauan; Pembangunan hutan kota; Pengelolaan taman nasional yang menjadi warisan alam dunia);



Goal 12: Responsible Consumption and Production (mendorong penerapan ekolabel pengadaan barang dan jasa; Verifikasi legalitas kayu; Layanan dan pendampingan sertifikasi mutu usaha yang ramah lingkungan);



Goal 13: Climate Actions (pengembangan sistem MRV; penyelenggaraan RAN-GRK; Penurunan emisi nasional sektor LULUCF; Pengendalian Karhutla, terutama pada kawasan hidrologis gambut);



Goal 15: Life on Land (kegiatan pengelolaan hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi; Rehabilitasi hutan dan lahan kritis; Penyediaan benih dan bibit; pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus; Penelitian dan pengembangan; rehabilitasi lahan akses terbuka; Restorasi ekosistem; Restorasi kawasan hidrologis gambut; Pengembangan hutan rakyat; Pengukuran indeks kualitas tutupan lahan berhutan; Penegakan hukum; Peningkatan populasi spesies terancam punah dan konservasi sumberdaya genetik).

7 GOALS SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN





Foto: Pokja SDG Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pokja TPB/SDGs telah memetakan sinergisitas masing-masing *output* program KLHK dalam mendukung seluruh *goals* TPB/SDGs, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keselarasan arah kebijakan TPB/SDGs dapat dilihat dari berbagai program dan kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. KLHK sepenuhnya mendukung setiap upaya pencapaian Target dan Indikator TPB/SDGs yang sesuai dengan lanskap ekologi, sosial dan budaya di Indonesia. Sebagai upaya diseminasi dari hal-hal yang telah dicapai, FORCLIME memfasilitasi penyusunan *infographic design* dalam pembuatan dokumen elektronik capaian SDGs KLHK tersebut pada bulan Agustus 2020.

Di pertengahan tahun 2021, Pokja SDGs melalui Biro Perencanaan KLHK menerbitkan Panduan Reviu Rincian Output terhadap Tujuan, Target, dan Indikator TPB/SDGs atau SDGs *Scorecard*. Buku panduan ini diharapkan menjadi dasar untuk penilaian yang objektif serta dapat meningkatkan pemahaman serta respon terhadap agenda global TPB/SDGs di lingkup KLHK. Untuk memudahkan dan membuat buku panduan tersebut menarik, FORCLIME memfasilitasi tenaga ahli untuk menyusun *design layout*-nya.

Template SDGs Scorecard untuk Reviu Rincian Output dikembangkan dengan tujuan untuk menilai kontribusi kegiatan lingkup KLHK dalam pencapaian SDGs. Terdapat delapan bagian utama SDGs *Score Card* yang harus diisi secara objektif dengan merujuk pada petunjuk pengisian yang terdapat di buku panduan.

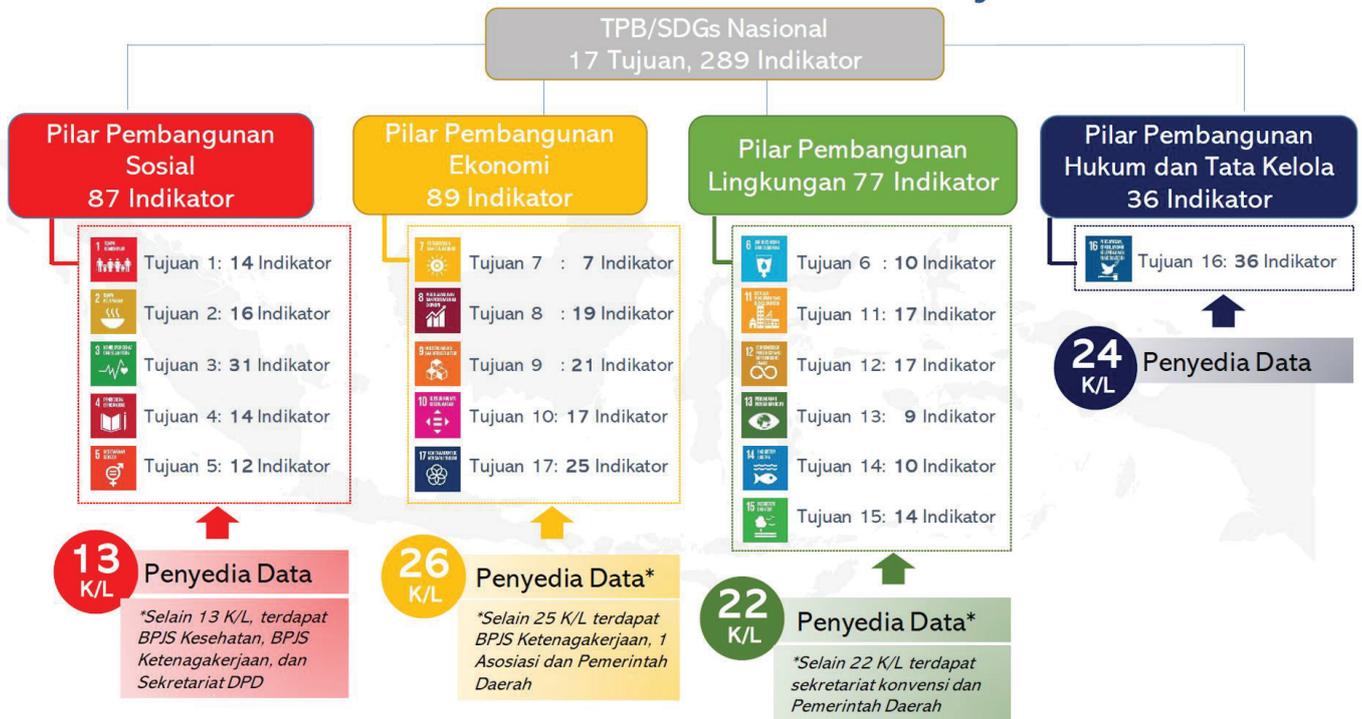
Pada bagian akhir, akan didapat skor responsif rata-rata kegiatan yang menggambarkan kontribusi dan kepekaan kegiatan KLHK terhadap pencapaian TPB/SDGs. Interpretasi skor responsif rata-rata dimaksud adalah sebagai berikut:

Skor 7 - 9	▶ kegiatan sangat responsif dan berkontribusi terhadap TPB/SDGs.
Skor 4 - 6,99	▶ kegiatan bersifat sedang dalam berkontribusi atau agak responsif terhadap TPB/SDGs.
Skor 1 - 3,99	▶ kegiatan bersifat sedikit berkontribusi atau kurang responsif terhadap TPB/SDGs.



Foto: Pokja SDG Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Indikator SDGs Nasional Edisi II dan Penyedia Data



Sumber: Paparan Sekretariat Nasional TPB/SDGs Kementerian PPN/Bappenas pada Workshop TPB/SDGs Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 03 Desember 2020

Dalam penilaian ini dilibatkan partisipasi multi-level dan multi sektor untuk meninjau ulang komponen kegiatan setiap program di lingkup KLHK. Oleh karena itu, hasil penilaian dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan yang lebih konklusif dan lebih rasional terhadap keberlanjutan suatu komponen, apakah perlu dilanjutkan, dimodifikasi atau dihapuskan.

Pokja TPB/SDGs juga mendorong pemahaman para pihak di lingkup KLHK terhadap upaya pencapaian TPB/SDGs. Sebagai salah satu upaya untuk mendokumentasikan kontribusi kegiatan terhadap TPB/SDGs di KLHK maka di kuartal III tahun 2021 ini, Pokja TPB/SDGs menyelenggarakan lomba karya tulis TPB/SDGs dengan sasaran peserta seluruh pegawai ASN lingkup KLHK di bulan Agustus dan September

2021. Ketentuan lomba secara detil dapat diakses melalui https://bit.ly/LKT_SDGs_2021.

Sebagai rangkaian lomba karya tulis, pada tanggal 4-5 Oktober 2021 juga akan diadakan webinar nasional TPB/SDGs KLHK yang bertajuk “Menjaga Keberadaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan sebagai Modal Pembangunan Berkelanjutan”. FORCLIME akan memfasilitasi tenaga ahli untuk *design layout* dan pencetakan buku prosiding lomba karya tulis dan webinar tersebut.

Terkait dengan pengarusutamaan SDGs di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, FORCLIME 4.0 akan tetap mendukung Pokja SDGs KLHK dalam implementasi pengarusutamaan SDGs dengan fokus penekanan kebersinambungan pengarusutamaan SDGs melalui kebijakan dan monitoring serta evaluasi.

FORCLIME siap dukung Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat susun rancang bangun baru untuk wilayah KPH

7 Agustus 2021



Dalam rangka mendukung penyusunan rancang bangun baru untuk wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Papua Barat, Tim FORCLIME di Papua Barat mengadakan rapat koordinasi bersama Kepala Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Bapak Jimmy W. Susanto, S.Hut., MP., pada hari Sabtu, 7 Agustus 2021. Pertemuan yang diadakan secara daring tersebut, juga membahas rencana dukungan FORCLIME memfasilitasi audiensi ke Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengenai konsep Rancang Bangun wilayah KPH Papua Barat.

Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan potensial dukungan FORCLIME terkait dengan kegiatan-kegiatan KPH, antara lain:

1. Peningkatan kapasitas SDM KPH melalui program *coaching clinic*, pelatihan dan pendampingan bagi staff KPH beserta Kelompok Tani Hutan di desa pilot FORCLIME.
2. Dukungan teknis revisi atau penyesuaian rencana pengelolaan hutan (RPHJP) KPH menyesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh KLHK.
3. Dukungan terkait aktivitas bisnis Kelompok Tani Hutan binaan di wilayah KPH.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

[Nita Yohana](#) Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat

[Melanesia Brigitte Boseran](#), Advisor Junior bidang pengelolaan dan konservasi hutan, Papua Barat

[Mohammad Sidiq](#), Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

FORCLIME siap dukung Pokja Perhutanan Sosial Papua Barat

9 Agustus 2021



Dalam rangka berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, tim FORCLIME di Papua Barat mengadakan pertemuan secara daring pada tanggal 9 Agustus 2021. Pertemuan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pembinaan Hutan dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Bapak Yunus Krey, S.Hut., M.Si, membahas tentang perkembangan perhutanan sosial di provinsi serta kesiapan FORCLIME untuk mendukung Pokja Perhutanan Sosial Provinsi Papua Barat.

Kehadiran FORCLIME disambut dengan sangat baik oleh Bapak Yunus Krey. "Keterlibatan FORCLIME diharapkan pelaksanaannya dalam jangka menengah dan panjang. Karena tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan perhutanan sosial adalah setelah izin diperoleh, tantangan dalam pendampingan maupun tantangan membuka akses pasar", kata Kepala Bidang Pembinaan Hutan dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.

Dalam pertemuan tersebut disampaikan rencana dukungan FORCLIME dalam pelaksanaan kegiatan Pokja Perhutanan Sosial, termasuk:

1. Penyusunan roadmap Perhutanan Sosial;
2. Dialog program Perhutanan Sosial dan penguatan peran masyarakat adat dalam pengelolaan hutan dan pembangunan ekonomi;
3. Dukungan untuk pemberdayaan kelompok masyarakat di desa pilot wilayah kerja FORCLIME;
4. Pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

[Nita Yohana](#) Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat

[Melanesia Brigitte Boseran](#), Advisor Junior bidang pengelolaan dan konservasi hutan, Papua Barat

[Mohammad Sidiq](#), Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

FORCLIME dukung upaya selaraskan kesehatan manusia dan kesehatan hutan di Tanah Papua

13 Agustus 2021

Untuk mencapai masyarakat sehat, sejahtera serta berkelanjutan, maka perlu menyelaraskan kesehatan manusia dan kesehatan lingkungan, dalam hal ini hutan. Karena keduanya saling berkaitan dan ketergantungan. Program konservasi hutan melalui pelayanan kesehatan untuk masyarakat di dalam dan di sekitar hutan telah berhasil dikembangkan oleh Yayasan Alam Lestari (ASRI) di Kalimantan Barat, yang kemudian dipresentasikan kepada FORCLIME. Dan FORCLIME menyambut baik inisiatif tersebut dengan harapan ASRI bisa mengembangkan konsep pelayanan kesehatan berbasis konservasi di Tanah Papua. FORCLIME menganggap konsep menghubungkan aspek kesehatan dengan perlindungan hutan adalah sebagai langkah strategis untuk masa depan. Untuk itu, FORCLIME mendukung diadakannya studi kelayakan sebagai langkah awal. Lokasi kegiatan akan dilaksanakan di Kabupaten Jayapura (Provinsi Papua) dan Kabupaten Tambrau (Provinsi Papua Barat). Oleh karenanya, Tim FORCLIME di Papua Barat mengadakan pertemuan secara daring dengan Yayasan ASRI pada tanggal 13 Agustus 2021 membahas rencana pelaksanaan studi kelayakan untuk menemukan lokasi yang paling cocok bagi mengembangkan program kesehatan masyarakat berbasis konservasi hutan. Hasil dari studi kelayakan ini akan menentukan jenis program yang akan dilaksanakan, yang tentunya berkaitan dengan kesehatan berbasis konservasi dengan mempertimbangkan karakter sosial – budaya masyarakat lokal. Dalam pelaksanaannya nanti, kegiatan ini akan melibatkan para pihak terkait, termasuk Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam di Papua Barat, Universitas Papua, Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau.



Dukungan FORCLIME lainnya terkait dengan persiapan pengembangan kesehatan masyarakat berbasis konservasi hutan adalah membuka peluang magang bagi pelajar dari universitas lokal untuk membantu ASRI melaksanakan studi kelayakan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

[Nita Yohana](#) Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat

[Melanesia Brigitte Boseren](#), Advisor Junior bidang pengelolaan dan konservasi hutan, Papua Barat

[Mohammad Sidiq](#), Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat



Lanskap hutan Papua
Foto: Georg Buchholz

Evaluasi Program Bakti Rimbawan bersama Kepala KPH 6 Agustus 2021



Dalam rangka pelaksanaan [evaluasi program Bakti Rimbawan](#), Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) bersama FORCLIME melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) Evaluasi Program Bakti Rimbawan bersama Kepala KPH di seluruh Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2021 secara daring dan luring. Tujuan FGD ini adalah untuk:

1. Mendapatkan informasi seputar dinamika pelaksanaan Program Bakti Rimbawan di lapangan;
2. Mengidentifikasi capaian, dampak, tantangan, kendala, dan *exit strategy* program Bakti Rimbawan (termasuk skema pemenuhan SDM kehutanan KPH di masa yang akan datang);

FORCLIME dukung Balai TN Wasur laksanakan evaluasi rencana pengelolaan jangka panjang 24 Agustus 2021

Untuk mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan di Provinsi Papua, FORCLIME berkomitmen untuk mendukung Balai Taman Nasional (TN) Wasur dalam melaksanakan evaluasi Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Balai TN Wasur 2014-2023. Dalam kegiatan evaluasi ini, dibentuk Tim Kerja Evaluasi Dokumen RPJP Balai TN Wasur yang ditetapkan melalui Surat Ketetapan Kepala Balai TN Wasur. FORCLIME sendiri tergabung dalam tim kerja evaluasi tersebut. Tim kerja akan mengevaluasi capaian dari 6 kegiatan pokok pengelolaan, yaitu:

1. Pemantapan status dan penataan kawasan,
2. Penguatan kelembagaan,
3. Pengawetan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya,
4. Pemanfaatan kawasan,
5. Penyelenggaraan fungsi penelitian dan pendidikan, dan
6. Peningkatan perekonomian masyarakat.

Kegiatan evaluasi dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2021-3 September 2021. Pada tanggal 24 Agustus 2021, FORCLIME menghadiri pertemuan koordinasi tim kerja yang dilakukan

3. Menyusun masukan yang terkumpul untuk Kementerian LHK dan pemerintah daerah terkait dengan masa depan tenaga Bakti Rimbawan yang sekarang aktif di lapangan.

Menurut Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi SDM Non Aparatur Kementerian LHK, Dr Iwan Setiawan, salah satu upaya yang bisa dilakukan saat proses *exit strategy* program Bakti Rimbawan tengah berlangsung adalah pemerintah provinsi atau Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bisa mengajukan formasi untuk tenaga teknis. “Kami memohon kepada Pemda dan BKD dari setiap provinsi dapat mengajukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) atau calon PNS untuk kebutuhan tenaga teknis. Beberapa provinsi seperti NTB dan Jawa Barat sudah mengusulkan dan beberapa dari tenaga Bakti Rimbawan juga sudah diterima sebagai penyuluh atau Polhut”. “Kami tidak ingin potensi mereka yang sudah kami bina selama ini dilepaskan begitu saja”, tambah Dr Iwan Setiawan.

Dalam rangka evaluasi program Bakti Rimbawan ini juga dilakukan survei secara daring. Rekapitulasi hasil kuisioner yang dilakukan secara daring dan hasil FGD dengan Kepala KPH kemudian akan dirumuskan dan disusun sebagai masukan bagi Kementerian LHK dan pemerintah daerah terkait dengan kelanjutan dari Program Bakti Rimbawan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

[Edy Marbyanto](#), Manajer bidang strategis pengembangan SDM
[Wira Hakim](#), Advisor junior pengembangan SDM



secara daring. Pertemuan ini dibuka oleh Kepala Balai TN Wasur, Bapak Yarman, S.Hut, MP. Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan ini adalah *timeline* kegiatan evaluasi serta rencana kegiatan pengumpulan data dan analisis data.

Hasil dari evaluasi RPJP Balai TN Wasur ini nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJP Balai TN Wasur untuk periode 2020-2029.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

[Theodora F. Resubun](#), Advisor pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua
[Mohammad Sidiq](#), Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat

FORCLIME Kerja Sama Teknis (TC) adalah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan GIZ, dan didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ).

Alamat FORCLIME: Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Blok 7 lantai 6. Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat 10270
 T: +62 (0)21 572 0212, +62 (0)21 572 0214
www.forclime.org
 Surel korespondensi: ratu.widyawati@giz.de



diimplementasikan oleh:

